BAPELKES jogja istimewa
Never Ending Learning

LAPORAN TAHUNAN 2022

BALAI PELATIHAN KESEHATAN (BAPELKES)

DINAS KESEHATAN
D. I. YOGYAKARTA

PENGESAHAN

LAPORAN TAHUNAN

BALAI PELATIHAN KESEHATAN (BAPELKES)

Laporan ini telah disetujui dan disahkan oleh :

Kepala Bapelkes DIY

PEMERINTAH DAERAH DIY BAPELKES DISKES

Sugiharto, S.K.M., M.P.H

NIP. 19700602 199303 1 003

DINAS KESEHATAN D. I. YOGYAKARTA

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……..... i
LEMBAR PENGESAHAN …….. ii
DAFTAR ISI ……..... iii
BAB I PENDAHULUAN …….. 1
A. Latar Belakang …… 1
B. Tujuan Penyusunan ……... 2
C. Ruang Lingkup . …….. 2
BAB II RENCANA STRATEGIS BAPELKES …….. 3
A. Arah Kebijakan …… 3
B. Visi ……. 3
C. Misi …… 3
D. Motto ……. 3
E. Tujuan ……... 3
F. Strategi …… 4
G. Kegiatan …… 5
BAB III STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI …….. 7
A. Tugas Pokok dan Fungsi …… 7
B. Keadaan Pegawai …… 9
C. Keadaan Sarana dan Prasarana ……..… 12
BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN ……. 14
A. Urusan Wajib/ Pilihan ……. 14
B. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan …….. 21
C. Inovasi dan Prestasi …… 21
BAB V PENGELOLAAN PENDAPATAN …….. 23
1. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN ……. 23
2. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ……. 23
3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI …….. 23
BAB VI PENUTUP ……. 26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kualitas SDM kesehatan mempunyai peranan penting dalam pembangunan bidang kesehatan. Peran tersebut diantaranya adalah melalui peningkatan integritas dalam pemberian pelayanan kesehatan, peningkatan skill/keterampilan tenaga medis dalam penanganan pasien, peningkatan kompetensi tenaga dan SDM kesehatan dalam teknis promosi kesehatan, dan sebagainya. Semua peran tersebut pada akhirnya akan mendukung meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kualitas SDM kesehatan adalah melalui pendidikan dan pelatihan kesehatan. Balai Pelatihan Kesehatan Diskes DIY sebagai salah satu unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan DIY memiliki tugas merencanakan, menyelenggarakan dan mengevaluasi pelatihan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat untuk meningkatkan persentase mantan linatih yang meningkat kompetensinya sesuai dengan Pergub DIY Nomor 110 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang pembentukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan.

Dengan ditetapkannya Bapelkes menjadi PPK BLUD dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 169/KEP/2014 tertanggal 25 Juli 2014 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan DIY untuk Melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status bertahap, maka Bapelkes Dinas Kesehatan DIY dapat mengupayakan fleksibilitas yang lebih baik dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan melalui penerapan PPK BLUD yang telah dimulai sejak Tahun 2015. Bapelkes Dinas Kesehatan DIY memiliki peluang yang lebih luas dalam memberikan pelayanan diklat dengan sumber dana di luar APBD dan APBN yaitu melalui kas BLUD. Di samping itu Bapelkes Dinas Kesehatan DIY berupaya menata sistem administrasi dan manajemen dalam penerapan PPK BLUD untuk ikut mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan khususnya di sektor kesehatan. Dengan telah disahkannya Permendagri nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah maka Bapelkes ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 366/KEP/2018 tertanggal 17 Desember 2018 tentang Penetapan Unit Pelaksanan

Teknis Dinas/Badan pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

B. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Laporan Tahunan Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan DIY Tahun Anggaran 2022 ini adalah memberikan gambaran tentang pelaksanaan seluruh kegiatan pada unit kerja di lingkungan Balai Pelatihan Kesehatan DIY meliputi; Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengembangan dan Peningkatam Mutu Pelatihan, dan Seksi Penyelenggaraan Pelatihan. Laporan tahunan ini akan disusun dengan pendekatan capaian kinerja dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkup Balai Pelatihan Kesehatan DIY.

C. Ruang Lingkup

Laporan Tahunan Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan DIY Tahun Anggaran 2022 ini memuat informasi mengenai:

1) Kondisi Umum Bapelkes
2) Rencana Strategis Bapelkes
3) Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
4) Pelaksanaan Program/Kegiatan
5) Pengelolaan Pendapatan
6) Kesimpulan dan Saran

BAB II

RENCANA STRATEGIS BAPELKES

A. Arah Kebijakan

Dalam rangka pembangunan SDM kesehatan, Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan DIY mempunyai peranan penting dan strategis dalam peningkatan kompetensi SDM kesehatan yang berasal dari aparatur dan masyarakat yang selanjutnya akan berkontribusi pada perbaikan pelayanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Peran dan kedudukan Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan DIY menjadi sangat penting dan strategis sejalan dengan penerapan PPK BLUD sehingga dapat memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan khususnya di bidang kesehatan dengan lebih luas dan komprehensif.

B. Visi

Mendukung Visi Pemda DIY ‘Terwujudnya Peningkatan Kemulliaan Martabat Masyarakat Jogja’

C. Misi

1. Sebagai Institusi Pelatihan yang Terakreditasi, Profesional, dan Akuntabel
2. Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Pelatihan
3. Meningkatkan Kepuasan Pengguna Layanan

D. Motto

Never Ending Learning

E. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi Bapelkes, maka tujuan Rencana Strategis Bisnis Bapelkes 2017-2022, dalam kurun waktu 5 tahun mendatang adalah:

1. **Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan,** tujuan ini mengindikasikan kepada keinginan bahwa setiap penyelenggaraan kegiatan pelayanan dapat diberikan dalam kadar kualitas yang terus membaik. Indikator kualitas dapat dilihat dari output melalui berbagai perspektif diantaranya index kepuasan peserta, index kepuasan institusi mitra, pemenuhan standar-standar pelayanan kediklatan, *consumer return index*, dan lain sebagainya. Kata meningkatkan berpedoman kepada kenyataan bahwa nilai index kepuasan dari

setiap orang akan terus bertumbuh sesuai perkembangan sehingga penyelenggaraan pelayanan juga harus secara terus menerus dapat mengimbangi perkembangan tersebut (*change management*).

2. **Meningkatkan ketanggapan kebutuhan layanan,** ketanggapan (*responsiveness*) dalam hal ini adalah bagaimana Bapelkes dapat mengembangkan kemampuannya untuk selalu dapat menangkap perkembangan peluang dan mengembangkannya menjadi produk-produk inovatif maupun kualitas aitem pelayanan yang menjadi kebutuhan konsumen. Kebutuhan ini dapat diterjemahkan secara institusional sebagai jenis produk layanan dan personal sebagai jenis pelayanan**.** Sebagaimana tingkat kepuasan, kebutuhan juga akan terus bertumbuh mengikuti perkembangan yang ada sehingga organisasi harus mampu secara terus menerus meningkatkan kemampuannya.
3. **Meningkatkan pembiayaan pengembangan pelayanan,** pembiayaan menjadi hal yang sangat krusial untuk pengembangan. Dengan tuntutan kualitas dan kompetisi yang diprediksi akan semakin ketat, kemampuan ketanggapan organisasi menjadi mutlak. Ketanggapan tidak dapat dijamin dapat dipenuhi jika pembiayaan yang tersedia tidak adekuat. Pembiayaan dalam hal ini adalah kemampuan untuk dapat menghasilkan pendapatan dan sumberdaya-sumberdaya yang sah secara memadai untuk pengembangan. Pembiayaan tidak hanya membicarakan maksimalisasi manajemen untuk memperoleh pendapatan namun juga dengan maksimalisasi efisiensi dan pengembangan kemitraan yang saling menguntungkan.
4. **Meningkatkan kuantitas dan perluasan jangkauan pengguna**. Untuk dapat menjamin adanya peningkatan pembiayaan maka yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pendapatan melalui peningkatan utilisasi produk dan untuk dapat lebih memperkuat perlu diperluas jangkauan dengan mengingat bahwa batasan geografis saat ini tidak lagi menjadi hambatan yang mendasar. Perluasan jangkauan juga mengandung arti adanya pengembangan tradisi kemitraan mengingat bahwa hal ini seringkali dapat menjadi bagian penting bagi pengembangan sumberdaya di Bapelkes. Kemitraan juga menjadi salah satu aspek pemasaran yang sangat ampuh dan efisien di luar wilayah DIY.

F. Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, dengan memperhatikan sumberdaya organisasi dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara (strategi) pencapaian tujuan dan sasaran

yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan. Strategi yang ditempuh Bapelkes DIY sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan
   a) Menerapkan dan meningkatkan standar mutu institusi dan SPM
   b) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM diklat
   c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana
   d) Mengembangkan kualitas manajemen pelayanan
2) Meningkatkan ketanggapan kebutuhan produk layanan
   a) Mengembangkan riset produk dan pelayanan
   b) Mengembangkan inovasi dan mutu produk pelayanan
3) Meningkatkan pembiayaan pengembangan pelayanan
   a) Meningkatkan pendapatan institusi
   b) Meningkatkan anggaran dan sumberdaya melalui sumber-sumber sah
4) Meningkatkan kuantitas dan perluasan jangkauan pengguna
   a) Intensifikasi dan ekstensifikasi pemasaran produk layanan
   b) Pengembangkan kemitraan / kerjasama

G. Kegiatan

Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat akan pelayanan publik maka diperlukan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya adalah dengan melakukan evaluasi untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan oleh berbagai unit organisasi/perangkat daerah di bidang pelayanan. Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik, yaitu pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pemberi layanan dan pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif penguna layanan atau publik. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pelayanan publik yang berkualitas, pemerintah sudah menerapkan benbagai kebijakan untuk memperbaiki pelayanan publik di Indonesia baik dari segi kualitas maupun kuantitas antara lain dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengamanatkan agar setiap penyelenggara

pelayanan secara berkala melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat, dimana ukuran keberhasilan penyelenggara layanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan dan kepuasan masyarakat identik dengan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara layanan.

Balai Pelatihan Kesehatan DIY tahun 2018 sudah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan 5 (lima) jenis layanan yaitu :

1). Layanan Pelatihan
2). Layanan Pelatihan BLUD
3). Layanan Non Pelatihan
4). Layanan Informasi
5). Layanan Pelayanan Pengaduan

dan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, karena pelaksanaan survei belum semua jenis Layanan tetapi baru untuk 3 (tiga) jenis layanan.

Jenis layanan yang mempunyai responden yaitu :

1. Jenis Layanan Pelatihan APBN / APBD
2. Jenis Layanan Pelatihan BLUD
3. Jenis Layanan Non Pelatihan

Dari Semua Jenis layanan mendapatkan mutu pelayanan A yaitu dengan kategori Sangat Baik.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pelatihan Kesehatan sesuai dengan Pergub DIY nomor 110 tahun 2022 tentang pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan dan evaluasi pelatihan manajemen dan teknis pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja Balai;
2. penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
3. pengembangan dan peningkatan mutu pelatihan;
4. pengembangan metode peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
5. penyelenggaraan pengelolaan laboratorium lapangan serta laboratorium kelas untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
6. pengembangan kemitraan Balai;
7. pelaksanaan ketatausahaan;
8. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

a. Subbagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan Pergub DIY nomor 110 tahun 2022 tentang pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

1) penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
2) penyusunan program kerja Balai Pelatihan Kesehatan;
3) pengelolaan kearsipan;
4) pengelolaan keuangan;

5) pengelolaan pendapatan;
6) pengelolaan kepegawaian;
7) pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
8) pengelolaan barang;
9) pelaksanaan kehumasan;
10) pengelolaan kepustakaan;
11) pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
12) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai Pelatihan Kesehatan;
13) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Tata Usaha; dan
14) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

b. Seksi Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pelatihan

Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pergub DIY nomor 110 tahun 2022 tentang pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas mengkoordinasikan program dan mengembangkan pelatihan teknis pelayanan kesehatan serta kegiatan monitoring dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pelatihan mempunyai fungsi:

1) penyusunan program kerja Seksi Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pelatihan;
2) perencanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
3) pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan kesehatan;
4) penyelenggaraan pengelolaan laboratorium lapangan serta laboratorium kelas untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
5) pengembangan kemitraan dan pemasaran;
6) pengendalian mutu kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
7) pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pelatihan; dan

8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

c. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan

Seksi Penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud Pergub DIY nomor 110 tahun 2022 tentang pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan pelatihan teknis pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan pelatihan ketrampilan kesehatan bagi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai fungsi:

1) penyusunan program kerja Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
2) penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan dan masyarakat;
3) penyelenggaraan pelayanan sarana dan prasarana;
4) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Penyelenggaraan Peatihan; dan
5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

4. Keadaan Pegawai

Jumlah pegawai Bapelkes Dinas Kesehatan sampai akhir Desember 2022 berjumlah 43 orang. Ada penurunan jumlah pegawai dibandingkan tahun 2021 (52 orang). Penurunan pegawai karena adanya pegawai pensiun. Keadaan pegawai adalah hasil pembaruan data dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang membantu di dalam mengelola data, maajemen dan adminitrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah. Distribusi pegawai menurut jenis jabatan (Gambar III.1) di Bapelkes Dinas Kesehatan DIY terdiri dari Struktural (3 orang), Fungsional Umum (16 orang), Fungsional tertentu (4 orang), Tenaga Bantu (15 orang) dan Pegawai BLUD (5 orang).

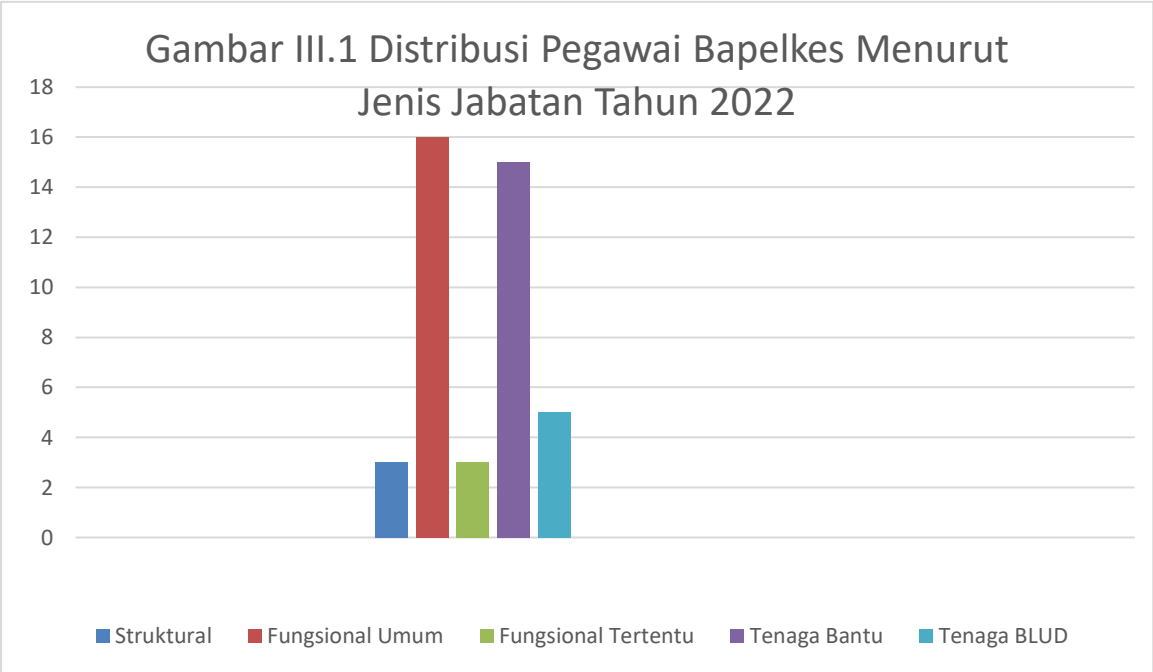

Gambar III.1 Distribusi Pegawai Bapelkes Menurut Jenis Jabatan Tahun 2022

Dari jumlah tenaga sebanyak 43 orang, terdiri dari Golongan IV sebanyak 7 orang, golongan III sebanyak 14 orang, golongan II sebanyak 2 orang (Gambar III.2).

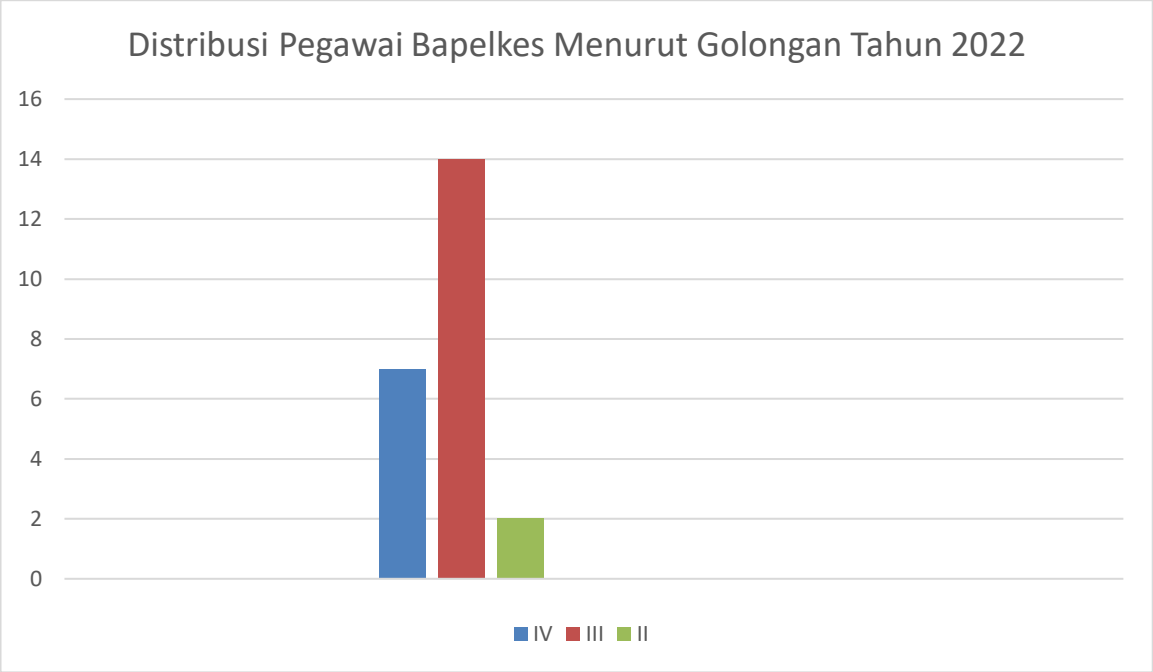

Gambar III.2 Distribusi Pegawai Bapelkes Menurut Golongan Tahun 2022

Distribusi pegawai menurut tingkat pendidikan (gambar III.3) di Bapelkes Dinas Kesehatan DIY tahun 2022 terbanyak adalah tingkatan Diploma tiga (4 orang) diikuti dengan SMA (3 orang), Strata Satu (5 orang), Strata Dua (8 orang) dan yang paling sedikit Diploma empat (3 orang).

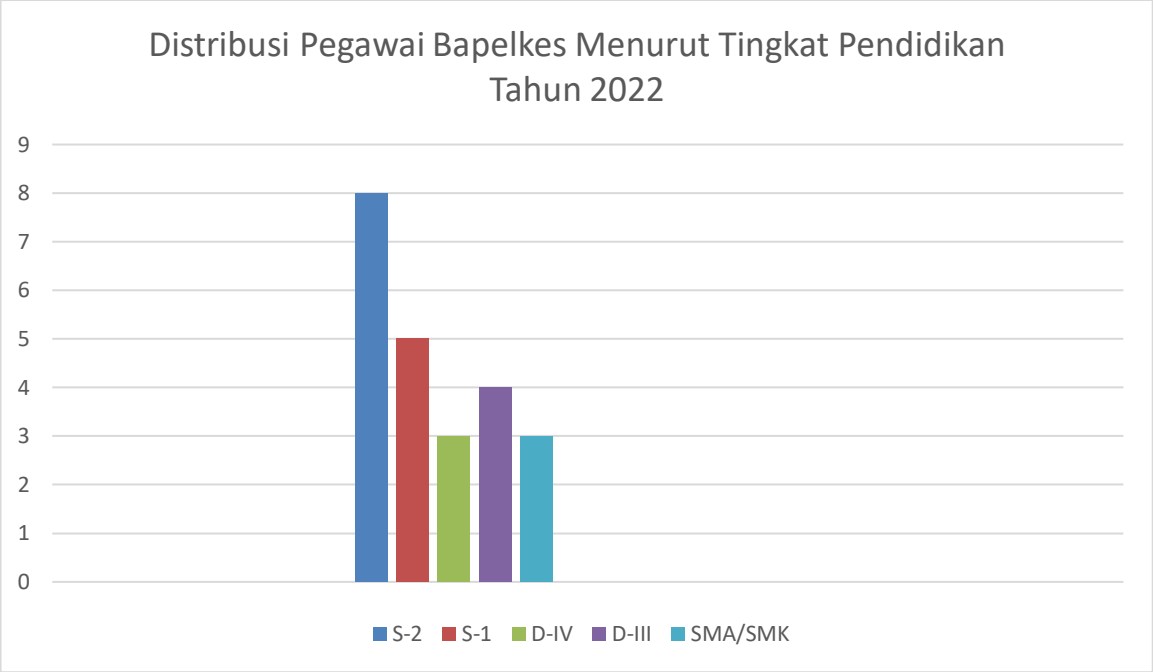

Gambar III.3 Distribusi Pegawai Bapelkes Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022

Menurut komposisi jenis kelamin pria sebanyak 3 orang (13,04%) dan wanita sebanyak 20 orang (86,96%). Persentase perbandingan antara pria dan wanita seperti pada gambar III.4.

Gambar III.4 Distribusi Pegawai Bapelkes Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

Aplikasi Metode Perencanaan SDMK dengan metode ABK (Analisis Beban Kerja) memberikan kemudahan Bapelkes Dinas Kesehatan DIY untuk melakukan perencanaan SDM Kesehatan dan Analisis Beban Kerja (Tabel III.1). Berdasarkan analisis beban kerja Bapelkes masih memiliki kekurangan 32 orang tenaga.

Tabel III.1. Analisis Beban Kerja di Bapelkes Tahun 2022

Instansi	Tenaga yang ada	Tenaga yang dibutuhkan	Kekurangan Tenaga
Bapelkes	23	55	32

Sumber : Rekap ABK 2022

Rincian kebutuhannya adalah tenaga fungsional widyaiswara, pemelihara sarana prasarana, pengelola sistem informasi dan jaringan, pengelola asrama, pengelola diklat, analis kerjasama Diklat, Analis Diklat, Analis Monev dan Pelaporan Kinerja Diklat. Untuk memenuhi kekurangan tenaga Bapelkes menggunakan tenaga non PNS untuk penata diklat, pranata kearsipan, tenaga penyusun informasi dan publikasi, pengelola diklat, analis diklat. Selain itu Bapelkes juga menambah dengan tenaga BLUD untuk pemelihara fasilitas kantor, penata diklat, penata kelas dan tenaga administrasi Keuangan BLUD.

5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Standarisasi sarana dan prasarana kerja tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008. Tujuan diberlakukan standar ini untuk menjamin optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesehatan jasmani dan rohani, keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur, cahaya dan ventilasi yang sehat, penataan yang bernilai estetika, dan perkembangan kantor sesuai volume/beban kerja dan struktur organisasi. Sarana dan prasarana kerja di lingkungan pemerintah daerah DIY meliputi ruangan kantor, perlengkapan kantor, kendaraan dinas dan rumah dinas. Adapun kondisi sarana dan prasarana di Bapelkes Dinas Kesehatan DIY adalah sebagai berikut :

1. Tanah, Gedung dan Bangunan

   Luas tanah Bapelkes Dinas Kesehatan DIY seluas 11.585 m^2 (unit Kalasan 8.335 m^2 dan Godean 3.250 m^2). Bapelkes Dinas kesehatan DIY masih membutuhkan beberapa ruangan sesuai Peraturan Gubernur nomor 26 tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah DIY dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 suatu bangunan negara juga membutuhkan sarana parkir kendaraan, gedung olah raga, ruang kesenian, sarana untuk penyandang cacat dan lansia, sarana penyediaan air minum, sarana drainase, limbah dan sampah, sarana ruang terbuka hijau, sarana hidran kebakaran halaman, sarana pencahayaan halaman, sarana jalan masuk dan keluar, ruang klinik, ruang menyusui, dan fasilitas komunikasi dan informasi.

Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan DIY membutuhkan luas bangunan untuk ruang kantor minimal 287 m^2. Adapun rincian yang dibutuhkan satu ruang untuk kepala setara eselon 3 @34 m^2, 3 ruangan untuk eselon 4 @19 m^2 yang jumlahnya 57 m^2 dan luas ruangan untuk pegawai non struktural sebanyak 49 orang per orang 4 m^2 sejumlahnya 196 m^2. Kondisi bangunan masih baik, dan sudah dipenuhi kebutuhan ruang pegawai. Bangunan Bapelkes sudah dilengkapi ruang tamu, ruang rapat, ruang depo arsip, ruang perpustakaan, ruang gudang, posko keamanan, musholla, kamar mandi/toilet. Sarana dan prasarana lain seperti ruang kelas dan asrama untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan kesehatan mengacu kepada Buku Standar Sumber Daya Pelatihan dari PPSDM Kementerian Kesehatan tahun 2011. Kebutuhan sarana yang perlu ditambah adalah ruang kelas untuk pendidikan dan pelatihan, ruang gym, ruang theatre dan auditorium .

2. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas Bapelkes bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peserta pelatihan di Bapelkes yang akan melaksanakan kegiatan di luar kelas. Kondisi kendaraan yang rusak, akan diusulkan untuk penghapusan. Rincian jumlah dan keadaan kendaraan (Tabel III.2) adalah sebagai berikut :

Tabel III.2. Kendaraan Dinas di Bapelkes Dinas Kesehatan DIY Tahun 2021

Instansi	Jumlah Kendaraan		Kondisi Baik		Usul Penghapusan (Kondiri Rusak)	
	Roda 4	Roda 2	Roda 4	Roda 2	Roda 4	Roda 2
Bapelkes	8	2	8	2	1	0

Sumber : Data aset terolah 2021

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

A. Urusan Wajib/Pilihan

1. Target Kinerja

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 maka Program, Kegiatan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Bapelkes untuk tahun 2017-2022 seperti pada tabel IV.1 berikut ini :

Tabel IV.1. Target Kinerja Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Bapelkes

Sasaran Program	Indikator kinerja program	Formulasi indikator	Satuan	Target				
				Th.1	Th.2	Th.3	Th.4	Th.5
Peningkatan Pelayanan Pelatihan Kesehatan pada BLUD Bapelkes	Persentase mantan linatih yang meningkat kompetensinya	54,5	%					

a. **Perjanjian Kinerja (PK)**

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, IKU, dan anggaran atau DPA. Karena adanya sinkronisasi dokumen perencanaan maka dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 dengan rincian pada tabel IV.2.

Tabel IV.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Program Sesuai RPJMD	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Bapelkes	Persentase mantan linatih yang meningkat kompetensinya	Persen (%)	68,00	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	68,00 68,00 68,00 68,00
	Peningkatan Kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Audit Mutu Internal (AMI) 2. EPP yang dilakukan (6 Laporan) 3. Grand Desain Lab. Kelas yang dibuat (1 Laporan) 4. Grand Desain Lab. Lapangan (1 Laporan) 5. Jasa Peralatan dan perlengkapan perkantoran yang mendukung operasional Bapelkes 6. Kurikulum Pelatihan yang dibuat 7. Pelayanan Pelatihan dan non pelatihan yang dilaksanakan 8. Pengembangan sistem Pembelajaran	Persen (%)	100,00	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	65,35 84,67 92,78 100,00
2	Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persen (%)	100,00	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	21,88 53,68 77,72 100,00
3	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen (%)	100,00	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	11,17 56,41 79,56 100,00
4		terwujudnya Penatausahaan	Persen (%)	100,00	Triwulan I	7,63

	Peningkatan Pelayanan BLUD	keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	18,88 32,79 100,00

b. Target Belanja Bapelkes Tahun 2022

Tabel IV.3 Target Belanja Bapelkes Tahun 2022

Uraian	Target (Rp)	Prosentase
Belanja Langsung APBD	1.939.046.600	91,88
Pendapatan BLUD	3.000.000.000	134,48
Jumlah	**6.379.171.492**	

2. Program dan Kegiatan

Bapelkes Diskes DIY memiliki satu program dan satu kegiatan yaitu Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Kesehatan pada BLUD Bapelkes dan Kegiatan Pelayanan Pelatihan SDM Kesehatan. Program dan kegiatan tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi 3 sub kegiatan.

3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Belanja langsung Bapelkes Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp **1.939.046.600** dengan realisasi sebesar Rp **1.781.690.803** atau **91,88%**. Rincian realisasi belanja terdiri dari:

A. Penyediaan Gaji dan Tunjagan ASN

Sampai dengan bulan Desember 2022 capaian realisasi keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjagan ASN Bapelkes DIY bersumber dana APBD dan BLUD sebesar Rp 1.097.769.632 dari target Rp 1.169.372.516 atau sebesar 96,87%.

B. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD

Sampai dengan bulan Desember 2022 capaian realisasi keuangan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Bapelkes bersumber dana APBD dan BLUD sebesar Rp 6.302.668.063 dari target Rp 3.435.247.032 atau sebesar 54,50%.

C. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sampai dengan bulan Desember 2022 capaian realisasi keuangan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Bapelkes bersumber dana APBD dan BLUD sebesar Rp 121.128.050 dari target Rp 165.288.500 atau sebesar 73,28%.

Seksi Penyelenggara Pelatihan memiliki tupoksi dalam penyelenggaraan kegiatan diklat dan pemasaran diklat. Untuk tahun 2022, Bapelkes menyelenggarakan 45 kegiatan baik pelatihan maupun non pelatihan, yaitu 1 kegiatan pelatihan dengan sumber dana dari APBD, 23 kegiatan bersumber dana Jasa Layanan BLUD, 16 kegiatan bersumber dana APBN, 5 kegiatan bersumber dana dari APBN Dinas Kesehatan DIY. (Grafik IV.1)

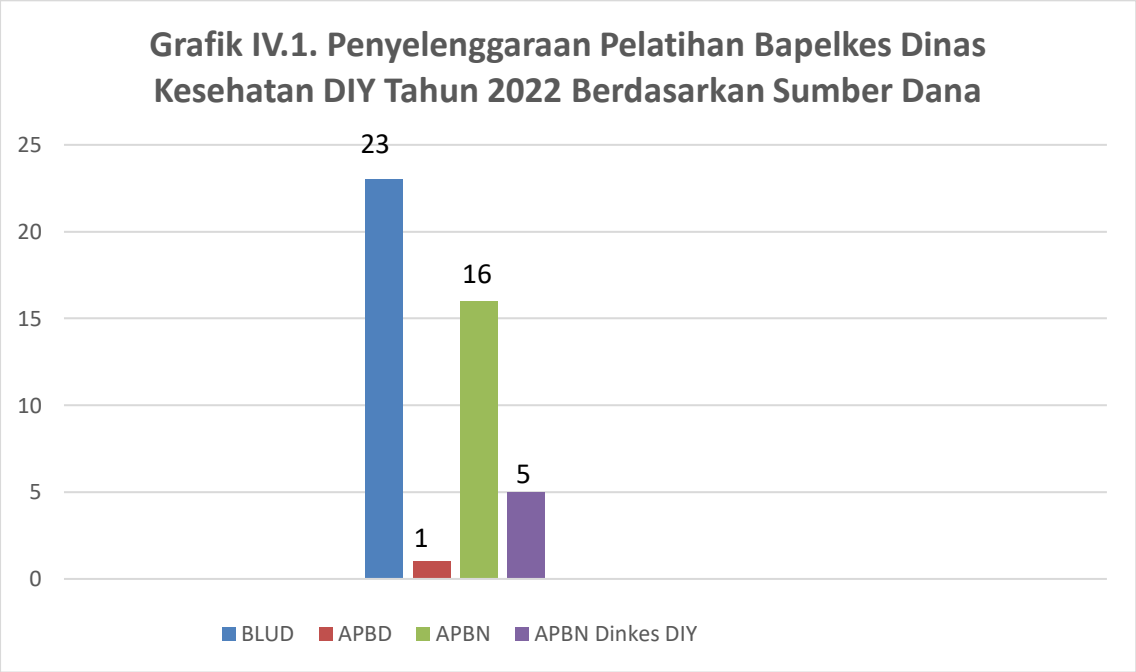

Jumlah kegiatan pelatihan di Bapelkes Dinas Kesehatan DIY Tahun Anggaran 2022 dari bulan Januari s.d Desember 2022 seperti pada grafik IV.3 di bawah ini.

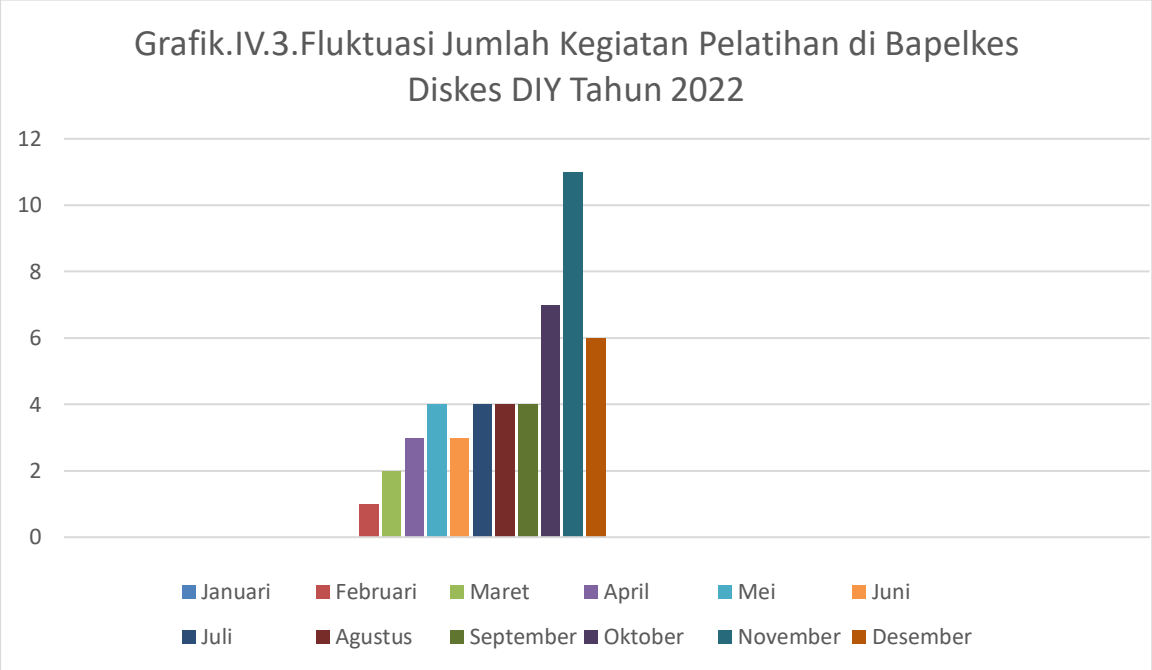

Berdasarkan grafik IV.3. di atas, jumlah peserta pelatihan di Bapelkes Dinas Kesehatan DIY Tahun Anggaran 2022 peserta kegiatan Pelatihan tertinggi pada bulan November yaitu mencapai 13 pelatihan, dan tidak ada kegiatan sama sekali di bulan Januari.

Pemanfaatan fasilitas sarana prasarana penunjang pelatihan di Bapelkes diukur *dengan* menghitung *Seat of Rate* (SOR) dan *Bed of Rate* (BOR). Untuk tahun 2021 tingkat pemanfaatan fasilitas terinci pada tabel IV.8.

Tabel IV.8. Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Di Bapelkes Yogyakarta tahun 2022

Pemanfaatan BapelkesUnit Kalasan & Unit Godean	Prosentase (%)
SOR	9,99
BOR	15,012

Sumber: Seksi Penyelenggara Pelatihan tahun 2022

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja tahun 2022 mengacu pada Renstra tahun 2017-2022. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci pada Tabel IV.9 sebagai berikut：

Tabel IV.9 Capaian Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSEN-TASE	KRITERIA/ KODE
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase mantan linatih yang meningkat kompetensinya	(%)	68	87,72	129	Sangat Baik

Target Kinerja dan anggaran serta realisasi kinerja dan anggaran Bapelkes tahun 2022 terinci pada Tabel IV.10 di bawah ini :

Tabel IV.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Program Tahun 2022

No	Sasaran Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi (dalam ribuan)	% Realisasi
1	Persentase mantan linatih yang meningkat kompetensinya	68	87,72	**129**	165.288.500	121.128.050	**73,28**

Sumber : Laporan Keuangan yang terolah 2022

Jumlah anggaran belanja langsung Bapelkes pada tahun anggaran 2022 dan realisasinya terinci pada tabel IV.11 dibawah ini :

Tabel IV.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program Tahun 2022

No	Program	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Pada BLUD Bapelkes)	6.302.668.063	3.435.247.032	54,50
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	165.288.500	121.128.050	73,28

Sumber : Laporan Monev Bapelkes bulan Desember 2022

Realisasi pendapatan dari Jasa Layanan BLUD Bapelkes Tahun 2022 melampaui target. Target pendapatan jasa Layanan Bapelkes tahun 2022 dan realisasinya terinci pada tabel IV.12 di bawah ini :

No	Program	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Pada BLUD Bapelkes)	3.000.000.000	4.034.582.399	134,49

4. Permasalahan dan Solusi

Sebagai organisasi dengan tata kelola BLUD Bapelkes DIY dituntut untuk kreatif dan inovatif menghasilkan dana-dana internal. Fleksibilitas yang dimiliki semestinya dapat digunakan untuk dapat lebih inovatif menciptakan jasa unggulan yang bermanfaat. Namun Bapelkes Diskes DIY masih belum dapat mengoptimalkan fleksibilitas yang dimiliki tersebut. Kelebihan dari organisasi dengan PPK BLUD adalah memiliki fleksibilitas dalam pemenuhan kebutuhan SDM nya, tenaga ASN yang tidak tercukupi baik secara kuantitas maupun kualitasnya dapat terbantu oleh tenaga kontrak yang direkrut dari jasa BLUD dengan mempertimbangkan kondisi keuangan.

Hubungan ketenagakerjaan yang berlangsung di Bapelkes cukup harmonis. Masing-masing pegawai di setiap seksi/subbag menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak jarang tugas tersebut berupa tugas lintas seksi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini terjadi ketimpangan SDM. Ritme kerja yang cepat, pekerjaan tambahan disamping pekerjaan rutin yang terus menerus, belum jelasnya aturan pembagian jasa layanan BLUD, belum jelasnya prosedur baku dan banyaknya aturan hukum dalam BLUD yang masih harus dipertegas aturan mainnya menjadi beberapa pemicu ketimpangan tersebut. Jasa layanan memang selalu diberikan, namun dasar penghitungan jasa layanan itu masih belum dipayungi aturan hukum dan bukti yang akurat serta belum menemukan model yang tepat bagi institusi pelatihan. Di tahun 2022, Bapelkes mengembangkan bukti kinerja perorangan yang terdokumentasi dimana setiap subbag/seksi diwajibkan membuat logbook (catatan harian) pegawai. Namun di sisi lain SDM Bapelkes merupakan

SDM yang handal dan loyal terhadap Bapelkes DIY, terbukti kurang lebih lima (5) tahun penerapan PPK BLUD capaian-capaian kegiatan dan realisasi target jasa layanan memenuhi target bahkan mungkin lebih. SDM yang handal tersebut juga didukung oleh latar belakang pendidikan dan pelatihan yang memadai dan juga pengalaman di bidang kediklatan yang sudah terasah. Dalam setiap tahunnya selalu dilakukan pelatihan bagi SDM internal seperti pelatihan pelayanan prima, pelatihan perpustakaan, arsiparis, capacity building, dan bahkan pelatihan Indonesia menulis sekaligus merupakan reward bagi pegawai Bapelkes. SDM yang berpengalaman. Loyal, dan handal ini merupakan kekayaan yang tidak ternilai bagi organisasi Bapelkes DIY. Namun di sisi lain SDM Bapelkes merupakan SDM yang handal dan loyal terhadap Bapelkes DIY, terbukti kurang lebih lima (5) tahun penerapan PPK BLUD capaian-capaian kegiatan dan realisasi target jasa layanan memenuhi target bahkan mungkin lebih. SDM yang handal tersebut juga didukung oleh latar belakang pendidikan dan pelatihan yang memadai dan juga pengalaman di bidang kediklatan yang sudah terasah. Dalam setiap tahunnya selalu dilakukan pelatihan bagi SDM internal seperti pelatihan TOC, pelatihan pelayanan prima, pelatihan perpustakaan, arsiparis, capacity building, dan bahkan pelatihan Indonesia menulis sekaligus merupakan reward bagi pegawai Bapelkes. SDM yang berpengalaman. Loyal, dan handal ini merupakan kekayaan yang tidak ternilai bagi organisasi Bapelkes DIY.

Setiap tahun Bapelkes selalu berupaya meningkatkan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana Ruang kelas yang memadai, asrama yang layak huni, lingkungan yang bersih dan sehat, sampai ketersediaan tempat ibadah, olahraga, dan hiburan, harus selalu dimonitor dan dievaluasi untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan pelanggan selama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Bapelkes.

B. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Bapelkes untuk tahun anggaran 2022 melalui Satker 049008 mendapatkan 1 angkatan yaitu Pelatihan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Bagi Kader Posbindu di Wilayah Kerja 1 angkatan.

C. Inovasi dan Prestasi

Bapelkes dalam meningkatkan pelayanan pelatihan, Bapelkes mempunyai beberapa inovasi yaitu :

1. Integrasi Sistem yang digunakan dalam pelatihan

- Identifikasi sistem yang digunakan untuk mendukung pembelajaran dalam pelatihan
- Memangkas langkah yang dapat disederhanakan untuk mempermudah peserta pelatihan mengakses pembelajaran
- Mengintegrasikan dalam satu link ,jika dimungkinkan dalam 1 sistem

2. Pengembangan perpustakaan
    - Kerjasama dengan Dinas Perpustakaan DIY untuk menjadi anggota jaringan sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library For All)
    - Penyusunan Kerjasama
    - Penyiapan dokumen digital
    - Integrasi katalog digital dari Inlistlite ke Opac
    - Bergabung dalam jaringan Sepatu Jolifa
3. Penyusunan Kurikulum Pelatihan
    - Menetapkan tim penyusun kurikulum
    - Koordinasi dengan stakeholder terkait
    - Study literature
    - Penyusunan draft kurikulum pelatihan
    - Pembahasan kurikulum pelatihan
    - Pengajuan pengesahan kurikulum

BAB V
PENGELOLAAN PENDAPATAN

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan

Peningkatan pendapatan Bapelkes diusahakan dengan cara melakukan promosi produk-produk Bapelkes ke pelanggan Bapelkes yang baru maupun lama. Tahun 2022 Bapelkes memanfaatkan *Learning Management System* (LMS) dengan pembuatan BEST (*Bapelkes E-Learning System*) yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana metode pelatihan yang di laksanakan oleh Bapelkes Dinas Kesehatan DIY baik untuk pelatihan klasikal, *blended learning*, hingga daring.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Tabel V.1. Target dan Realisasi Pendapatan Bapelkes DIY Tahun Anggaran 2019

Uraian	Target	Realisasi
Pendapatan	**3.000.000.000,00**	**4.034.582.399,00**
Pendapatan Asli Daerah	**3.000.000.000,00**	**4.034.582.399,00**
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3.000.000.000,00	4.034.582.399,00
Pendapatan dari Pengelolaan BLUD	3.000.000.000,00	4.034.582.399,00
Pendapatan dari Pengelolaan BLUD.	3.000.000.000,00	4.034.582.399,00

Target Pendapatan dari pengelolaan BLUD Balai Pelatihan Kesehatan Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 3.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 4.034.582.399,00 atau 134,49%.

3. Permasalahan dan Solusi

Semenjak menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Bapelkes DIY dapat memperluas layanan pendidikan dan pelatihan kepada pelanggan. Hal ini dikarenakan Bapelkes DIY dapat memberikan layanan diklat yang mengakomodir kebutuhan pelanggan dengan cara menuangkannya ke dalam perjanjian kerja sama dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Sebelum BLUD hal yang demikian sangat mustahil dilakukan, dan potensi pendapatan hanya berkisar pada sewa sarana prasarana penunjang diklat. Namun demikan, dalam operasional penjaringan potensi pendapatan masih ada beberapa kendala yang dihadapi Bapelkes DIY, diantaranya adalah:

1. Fleksibilitas perubahan target pendapatan dan belanja tidak diikuti dengan fleksibilitas perubahan anggaran di Sistim Informasi Perubahan Anggaran Daerah (SIPKD) Pemda DIY.

   Penuangan perubahan anggaran di SIPKD bagi BLUD masih seperti SKPD non BLUD yaitu hanya satu kali dalam satu tahun anggaran. Perubahan anggaran yang dimaksud adalah perubahan anggaran dimana selanjutnya akan ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Hal ini menyulitkan BLUD ketika sewaktu-waktu terjadi perubahan trend permintaan diklat, terutama permintaan diklat yang melebihi estimasi target pendapatan tahun berjalan. Model potensi pendapatan Bapelkes DIY mayoritas adalah jasa diklat yaitu pendapatan masuk, digunakan untuk operasional diklat minimal 70%, sisa dari operasional masuk ke dalam kas BLUD. Ketika realisasi pendapatan terlalu melebihi pendapatan yang ditargetkan, maka akan berimbas ke belanja yang bisa jadi melebihi anggaran yang tertulis di SIPKD.

   Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menyusun perencanaan yang setepat mungkin yang meliputi estimasi pendapatan dan belanja sampai dengan akhir tahun anggaran. Namun demikian akan lebih baik apabila ada fleksibilitas pada perubahan anggaran di SIPKD yang diberikan Pemda DIY untuk SKPD yang menerapkan PPK BLUD supaya pelayanan kepada costumer dapat lebih maksimal.

2. Keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya

   Sebagai instansi yang bergerak di pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan khususnya di bidang kesehatan, Bapelkes DIY dituntut untuk senantiasa dapat menyediakan sarana prasarana yang baik, lengkap, nyaman, dan bersih. Operasional tertinggi kegiatan Bapelkes DIY adalah di Kampus I Bapelkes DIY yang terletak di Jl. Raya Solo Km 12,8 Kalasan, Sleman, DIY. Gedung kampus I Bapelkes DIY telah berdiri sejak Tahun 1993. Gedung ini menyediakan sarana diklat meliputi ruangan kelas, asrama, dan rumah dinas. Dua puluh empat tahun berdiri, tentunya gedung Kampus I Bapelkes DIY membutuhkan rehab di berbagai tempat untuk memaksimalkan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Selain itu penambahan ruang kelas, ruang olahraga, dan asrama mulai menjadi perhatian Bapelkes untuk dapat memenuhi permintaan diklat dari pelanggan agar lebih maksimal.

   Pada tahun 2022, Bapelkes DIY memiliki 45 pegawai yaitu 4 pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu 5 orang, dan 16 orang pejabat fungsional umum, 15 orang Tenaga Bantu (Naban) Pemda DIY, serta 5 orang pegawai BLUD.

Mayoritas tingkat pendidikan pegawai Bapelkes DIY adalah SLTA yaitu sebanyak 3 orang, Diploma III sebanyak 4 orang, Strata I sebanyak 8 orang dan Strata II sebanyak 8 orang untuk PNS.

Jumlah dan distribusi pendidikan pegawai di Bapelkes DIY tersebut masih perlu ditingkatkan untuk bisa memenuhi tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi dan memberikan pelayanan yang maksimal bagi pelanggan Bapelkes DIY.

Solusi untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya seperti tersebut di atas adalah dengan pengusulan Tenaga ASN dan Non ASN ke BKD Pemda DIY berdasarkan Analisis Beban Kerja dan memberdayakan semua SDM Bapelkes untuk pelayanan diklat dan penunjang diklat. Selain itu Bapelkes DIY juga senantiasa berupaya mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana diklat di anggaran APBD setiap tahunnya.

BAB VI
PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Balai Pelatihan Kesehatan DIY pada Tahun Anggaran 2022 telah berjalan dengan baik berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya. Hasil laporan kinerja Bapelkes DIY tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Indikator tolak ukur kinerja program Bapelkes DIY tahun 2022 adalah Persentase mantan linatih yang meningkat kompetensinya. Pada tahun 2022, capaian indikator Kinerja program adalah 63,09% dari target 100,00%.
b. Realisasi pendapatan BLUD Bapelkes DIY Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp 4.034.582.399,00 atau sebesar 134,49% dari target Rp 3.000.000.000,00. Sedangkan realisasi belanja langsung Bapelkes DIY Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp 3.435.247.032,00 atau 54,50% dari pagu total Rp 6.302.668.063,00.
c. Untuk meningkatkan pendapatan Bapelkes dilakukan dengan melaksanakan promosi produk-produk Bapelkes ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinkes Kabupaten/Kota di wilayah DIY dan luar DIY.
d. Peningkatan kualitas pengendalian mutu pelatihan seperti akreditasi dan sertifikasi pelatihan untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap pelanggan Bapelkes.

BAPELKES
Never Ending Learning
jogja istimewa